

PARTISIPASI ANAK MUDA DALAM MUSRENBANG KOMUNITAS UNTUK PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DI KOTA TERNATE

Youth Participation in Community Musrenbang for Participatory Development Planning in Ternate City

Fahri Aufat¹
Sahrany A Hirto^{1*}
Thamrin Husain¹
Julfi Jamil¹
Abdurrahman Kader¹
Fathnun Tan¹

¹Universitas Muhammadiyah Maluku
Utara, Ternate

*corresponding author:
sahrany1987@gmail.com

Kata Kunci:
Musrenbang Komunitas
Partisipasi Anak Muda
Kota Ternate

Keywords:
Community Musrenbang
Youth Participation
Ternate City

Abstrak

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Komunitas merupakan inovasi Pemerintah Kota Ternate untuk memperluas partisipasi masyarakat, khususnya generasi muda, dalam perencanaan pembangunan daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk partisipasi anak muda dalam Musrenbang Komunitas serta kontribusinya terhadap penyusunan program pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap pejabat Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Ternate, pengurus komunitas, aktivis muda, dan peserta Musrenbang Komunitas. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Musrenbang Komunitas meningkatkan keterlibatan anak muda melalui lima tahapan partisipatif, yaitu *Connect*, *Collaborate*, *Co-Create*, *Commerce*, dan *Celebrate*. Model ini menghasilkan berbagai rekomendasi program inovatif di bidang ekonomi kreatif, ruang publik, pelestarian budaya, dan pemberdayaan komunitas yang sebagian telah diintegrasikan ke dalam RPJMD Kota Ternate. Namun, keberlanjutan forum masih menghadapi tantangan berupa konsistensi dukungan pemerintah dan penguatan mekanisme pengawalan implementasi program. Temuan ini menegaskan bahwa Musrenbang Komunitas merupakan model perencanaan pembangunan partisipatif yang memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.

Abstract

The Community Development Planning Forum (Musrenbang Komunitas) is an innovation introduced by the Government of Ternate City to expand public participation, particularly among young people, in regional development planning. This study aims to analyze youth participation in the Community Musrenbang and its contribution to community-based development planning. A descriptive qualitative approach was employed. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation involving officials of the Regional Development Planning, Research, and Development Agency (Bappelitbangda), community leaders, youth activists, and Community Musrenbang participants. Data were analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña. The findings reveal that the Community Musrenbang enhances youth participation through five participatory stages: *Connect*, *Collaborate*, *Co-Create*, *Commerce*, and *Celebrate*. The model generated innovative development proposals in creative economy, public space management, cultural preservation, and community empowerment, several of which have been incorporated into the Ternate City Regional Medium-Term Development Plan (RPJMD). Nevertheless, sustaining the participatory forum remains challenging due to inconsistent government support and limited mechanisms for monitoring program implementation. The study concludes that the Community Musrenbang represents an effective participatory planning model that strengthens collaboration between government and society.



© year The Authors. Published by Penerbit Forind. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>). Link: <https://jadment.forindpress.com/index.php/jadment>

Submite: 22-07-2026

Accepted: 01-08-2026

Published: 04-08-2026

PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan merupakan instrumen strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

yang berfungsi mengarahkan pembangunan secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan. Perencanaan tidak hanya dipahami sebagai proses penyusunan

program kerja, tetapi juga sebagai mekanisme untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, menentukan prioritas pembangunan, serta mengintegrasikan berbagai kepentingan pemangku kepentingan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Menurut Tjokroamidjojo 1992 dalam Hasan, (2018:60), perencanaan merupakan proses mempersiapkan berbagai kegiatan yang akan dilakukan guna mencapai tujuan tertentu, sedangkan Widodo (2006:54) memandang perencanaan sebagai upaya memprediksi kondisi masa depan sehingga pemerintah mampu mengantisipasi perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Dalam konteks pembangunan daerah, proses perencanaan diwujudkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), yaitu forum partisipatif yang mempertemukan pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan berbagai kelompok kepentingan dalam menyusun prioritas pembangunan. Keberadaan Musrenbang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menegaskan bahwa penyusunan rencana pembangunan dilakukan melalui pendekatan top-down dan bottom-up secara terpadu. Pendekatan tersebut bertujuan agar pembangunan tidak hanya berorientasi pada kebijakan pemerintah, tetapi juga mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat sesuai dengan kebutuhan daerah.

Musrenbang pada dasarnya merupakan instrumen demokrasi partisipatif yang memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan gagasan, kebutuhan, serta prioritas pembangunan. Abady (2013) menjelaskan bahwa Musrenbang bertujuan meningkatkan kualitas pembangunan melalui keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Sejalan dengan itu, Conyers (1991) dalam Nur Ritonga dan Humaizi (2021:191) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat penting karena mampu menyediakan informasi mengenai kebutuhan riil

masyarakat, meningkatkan legitimasi kebijakan pembangunan, serta memperkuat praktik demokrasi dalam pemerintahan daerah.

Kota Ternate menjadi salah satu daerah yang mulai mengembangkan inovasi dalam penyelenggaraan Musrenbang melalui pelaksanaan Musrenbang Komunitas. Berbeda dengan Musrenbang konvensional yang umumnya melibatkan unsur pemerintahan dan perwakilan masyarakat berdasarkan wilayah administratif, Musrenbang Komunitas memberikan ruang partisipasi kepada komunitas-komunitas anak muda untuk terlibat secara langsung dalam proses identifikasi masalah, penyusunan program, hingga penyampaian rekomendasi kepada pemerintah daerah. Inovasi ini pertama kali digagas pada tahun 2019 dan mulai diimplementasikan pada tahun 2023 oleh Pemerintah Kota Ternate melalui Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda).

Pelibatan anak muda dalam Musrenbang Komunitas menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam tata kelola pembangunan daerah. Generasi muda tidak lagi diposisikan sebagai objek pembangunan, tetapi sebagai aktor yang mampu menghasilkan ide, inovasi, dan solusi terhadap berbagai persoalan perkotaan. Keterlibatan tersebut juga menjadi sarana pembelajaran politik dan demokrasi partisipatif yang memperkuat kapasitas generasi muda dalam memahami proses perencanaan pembangunan.

Dalam perspektif kota kreatif, Charles Landry (2008) dalam (Fitriyana.1) menjelaskan bahwa jaringan kolaboratif antaraktor menjadi modal penting dalam menciptakan inovasi perkotaan. Semakin luas jaringan yang dibangun, semakin besar peluang munculnya gagasan kreatif yang dapat diterjemahkan menjadi kebijakan pembangunan. Oleh karena itu, keterlibatan komunitas dalam Musrenbang menjadi salah satu bentuk kolaborasi yang mampu memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Ismowati dkk. (2021:3) menemukan bahwa partisipasi publik dalam e-Musrenbang meningkatkan efektivitas proses perencanaan pembangunan. Penelitian Nur Ritonga dan Humaizi (2021:191) juga menunjukkan bahwa Musrenbang memberikan ruang demokrasi bagi masyarakat dalam menentukan prioritas pembangunan daerah. Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada pelaksanaan Musrenbang secara umum dan belum secara khusus mengkaji keterlibatan komunitas anak muda sebagai aktor utama dalam proses perencanaan pembangunan.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menganalisis Musrenbang Komunitas sebagai model partisipasi generasi muda dalam perencanaan pembangunan Kota Ternate. Fokus penelitian tidak hanya melihat tingkat partisipasi anak muda, tetapi juga mengkaji bagaimana komunitas mengidentifikasi isu pembangunan, menyusun rekomendasi program, serta mengawal integrasi hasil Musrenbang ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pendekatan ini memberikan perspektif baru mengenai transformasi tata kelola pembangunan yang lebih kolaboratif, inovatif, dan partisipatif.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses partisipasi anak muda dalam Musrenbang Komunitas Kota Ternate, mengidentifikasi tahapan penyusunan usulan pembangunan berbasis komunitas, serta menjelaskan mekanisme integrasi hasil Musrenbang Komunitas ke dalam perencanaan pembangunan daerah. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan model perencanaan pembangunan yang lebih demokratis, inklusif, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam proses partisipasi anak muda dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Komunitas serta kontribusinya terhadap perencanaan pembangunan di Kota Ternate. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan fenomena berdasarkan pengalaman, pandangan, dan interaksi para aktor yang terlibat secara langsung dalam proses perencanaan pembangunan.

Penelitian dilaksanakan di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, dengan fokus pada pelaksanaan Musrenbang Komunitas yang difasilitasi oleh Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Ternate. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposif karena Kota Ternate merupakan salah satu daerah yang mengembangkan Musrenbang Komunitas sebagai inovasi dalam memperluas partisipasi generasi muda pada proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap informan yang dipilih secara purposive, meliputi pejabat Bappelitbangda, ketua komunitas, aktivis muda, dan peserta Musrenbang Komunitas. Data sekunder diperoleh dari dokumen Musrenbang, laporan kegiatan, dokumen perencanaan pembangunan, serta berbagai literatur yang relevan dengan partisipasi masyarakat dan tata kelola pembangunan.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengamati secara langsung pelaksanaan Musrenbang Komunitas, wawancara dilakukan untuk menggali informasi mengenai proses partisipasi serta kontribusi anak muda dalam penyusunan program pembangunan, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data melalui berbagai dokumen, foto kegiatan, notulen rapat, dan laporan pelaksanaan Musrenbang.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang meliputi pengumpulan data (*data collection*), kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (*conclusion drawing/verification*). Analisis dilakukan secara berkelanjutan sejak proses pengumpulan data hingga penelitian selesai untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan makna dari setiap temuan. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik, sehingga hasil penelitian memiliki tingkat kredibilitas yang memadai dalam menjelaskan proses partisipasi anak muda dalam Musrenbang Komunitas dan kontribusinya terhadap perencanaan pembangunan di Kota Ternate.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendekatan Konsep Perencanaan Pembangunan

Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan merupakan salah satu prasyarat utama dalam mewujudkan tata kelola pembangunan yang inklusif, demokratis, dan berkelanjutan. Perencanaan pembangunan tidak lagi dipahami sebagai proses administratif yang sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah, melainkan sebagai proses kolaboratif yang melibatkan berbagai aktor pembangunan, termasuk masyarakat sipil, komunitas, dunia usaha, dan pemerintah daerah. Dalam perspektif tersebut, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pencapaian target pembangunan, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat memperoleh ruang untuk berpartisipasi dalam menentukan arah pembangunan daerah.

Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran Ginandjar Kartasasmita (1996) yang menyatakan bahwa pembangunan harus mampu memadukan pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan sosial. Menurutnya, pembangunan yang berorientasi pada masyarakat harus memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh warga untuk terlibat dalam proses pembangunan

sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata. Oleh karena itu, pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan merupakan bagian penting dalam menciptakan kebijakan pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks penelitian ini, Musrenbang Komunitas di Kota Ternate menjadi bentuk inovasi dalam sistem perencanaan pembangunan daerah yang mengedepankan kolaborasi antara pemerintah dan komunitas anak muda. Melalui pendekatan tersebut, masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek yang memiliki kesempatan untuk mengidentifikasi permasalahan, menyusun alternatif solusi, serta mengawal implementasi program pembangunan. Model ini menunjukkan adanya perubahan paradigma dari pendekatan top-down menuju bottom-up planning yang lebih partisipatif dan kontekstual.

Perencanaan Pembangunan sebagai Proses Sosial

Perencanaan pembangunan pada hakikatnya merupakan proses sosial yang melibatkan interaksi, negosiasi, dan pertukaran gagasan di antara berbagai aktor pembangunan. Dalam perspektif ini, masyarakat menjadi bagian penting dalam menentukan arah pembangunan karena mereka memiliki pengetahuan mengenai kondisi sosial yang dihadapi di lingkungannya.

Menurut Chambers (1997), pendekatan partisipatif merupakan upaya untuk mengurangi ketimpangan informasi dan kekuasaan antara pemerintah dan masyarakat. Melalui partisipasi, kelompok masyarakat memperoleh kesempatan untuk menyampaikan pengalaman, kebutuhan, dan pengetahuan lokal yang selama ini kurang terakomodasi dalam proses perencanaan konvensional.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa Musrenbang Komunitas di Kota Ternate telah menerapkan prinsip tersebut melalui pelibatan komunitas anak muda sejak

tahap identifikasi isu, penyusunan rekomendasi program, hingga penyampaian hasil kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, proses perencanaan tidak lagi berlangsung secara sepihak, tetapi berkembang menjadi ruang dialog yang memungkinkan terjadinya pertukaran gagasan antara pemerintah dan masyarakat.

Pendekatan Partisipatif dalam Perencanaan

Pendekatan partisipatif menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari identifikasi masalah, analisis kebutuhan, penyusunan solusi, hingga evaluasi pelaksanaan program. Dalam Musrenbang Komunitas, masyarakat memperoleh ruang yang luas untuk berkontribusi dalam penyusunan kebijakan pembangunan berdasarkan pengalaman dan kebutuhan yang mereka hadapi.

Friedmann (1987) menjelaskan bahwa perencanaan yang efektif adalah perencanaan yang bersifat *empowering*, yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengenali persoalan, merumuskan solusi, serta berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi menjadi penerima kebijakan, tetapi menjadi bagian dari proses pembentukan kebijakan itu sendiri.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip tersebut diterapkan melalui lima tahapan Musrenbang Komunitas, yaitu *Connect*, *Collaborate*, *Co-Create*, *Commerce*, dan *Celebrate*. Tahapan tersebut memberikan ruang kepada komunitas untuk menyampaikan gagasan, mengembangkan inovasi, dan mengawal implementasi hasil Musrenbang ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Pembangunan Berbasis Kebutuhan Nyata (Bottom-Up Planning)

Musrenbang Komunitas mengadopsi pendekatan bottom-up planning, yaitu proses penyusunan program pembangunan yang dimulai dari kebutuhan riil

masyarakat. Melalui pendekatan ini, masyarakat menjadi sumber utama informasi dalam mengidentifikasi persoalan pembangunan sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih kontekstual dan sesuai dengan kondisi lokal.

Menurut Midgley (2014), pembangunan berbasis komunitas memiliki tingkat keberlanjutan yang lebih tinggi karena mengoptimalkan potensi lokal sekaligus memperkuat kohesi sosial masyarakat. Keterlibatan masyarakat juga mendorong terbentuknya sense of ownership terhadap program pembangunan sehingga masyarakat memiliki komitmen yang lebih besar dalam mengawal implementasi program.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa berbagai rekomendasi program yang dihasilkan dalam Musrenbang Komunitas, seperti Ternate Smart Screen, Galeri Kebudayaan, Panggung Kreatif Benteng Oranje, dan Aplikasi Pasion, merupakan hasil identifikasi kebutuhan masyarakat yang kemudian diintegrasikan ke dalam RPJMD Kota Ternate. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendekatan bottom-up planning mampu menghasilkan program pembangunan yang lebih inovatif, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Tahapan Partisipatif dalam Musrenbang Komunitas di Kota Ternate

Setelah memahami landasan konseptual mengenai perencanaan pembangunan partisipatif, pembahasan selanjutnya menguraikan implementasi konsep tersebut dalam pelaksanaan Musrenbang Komunitas di Kota Ternate. Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, penelitian ini menemukan bahwa proses Musrenbang Komunitas dilaksanakan melalui lima tahapan utama, yaitu *Connect*, *Collaborate*, *Co-Create*, *Commerce*, dan *Celebrate*. Kelima tahapan tersebut membentuk suatu siklus partisipatif yang memungkinkan masyarakat tidak hanya menyampaikan aspirasi, tetapi juga merumuskan solusi, menyusun rekomendasi

program, mempresentasikan hasilnya kepada pemerintah daerah, hingga mengawal integrasi program ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Model tersebut menunjukkan bahwa Musrenbang Komunitas tidak hanya berfungsi sebagai forum konsultasi publik, tetapi berkembang menjadi mekanisme kolaboratif yang mempertemukan pemerintah dan komunitas dalam proses penyusunan kebijakan pembangunan. Dengan demikian, partisipasi masyarakat tidak berhenti pada penyampaian aspirasi, tetapi berlanjut hingga proses pengambilan keputusan.

a. Connect: Membangun Kesadaran terhadap Isu Pembangunan

Tahap *Connect* merupakan fase awal yang berorientasi pada identifikasi persoalan pembangunan Kota Ternate. Pada tahap ini seluruh peserta berdiskusi untuk memetakan berbagai isu strategis yang berkembang di masyarakat, seperti ekonomi kreatif, kesejahteraan sosial, pelestarian budaya, serta pemanfaatan teknologi sebagai pendukung pembangunan kota.

Ketua JARKOT Korda Maluku Utara, Maluku, Papua, dan Papua Barat ICCN menjelaskan bahwa proses tersebut berlangsung melalui diskusi aktif antarkelompok untuk menghasilkan rekomendasi program yang selanjutnya diuji kelayakannya sebelum diusulkan ke dalam RPJMD Kota Ternate.

"Proses ini berlangsung dengan diskusi aktif antara kelompok untuk menghasilkan rekomendasi program yang akan diuji kelayakannya dan kemudian dipromosikan dalam RPJMD Kota Ternate." (Wawancara, 18 Mei 2025).

Temuan tersebut diperkuat oleh Ketua Komunitas Dufa-Dufa Bergerak yang menjelaskan bahwa setiap kelompok diarahkan untuk mengidentifikasi permasalahan, merumuskan solusi, kemudian menyajikannya dalam bentuk maket yang

dipresentasikan kepada Wali Kota dan Organisasi Perangkat Daerah.

"Pada tahap ini torang fokus dengan masalah yang didiskusikan untuk menemukan solusi, kemudian dibuat dalam bentuk maket sebagai rekomendasi program yang dipresentasikan di depan Wali Kota dan OPD." (Wawancara, 15 Juni 2025).

Temuan penelitian menunjukkan bahwa tahap *Connect* berfungsi sebagai media membangun kesadaran kolektif mengenai persoalan pembangunan Kota Ternate. Forum ini memungkinkan komunitas menyampaikan kebutuhan masyarakat secara langsung sehingga permasalahan yang diangkat benar-benar berasal dari kondisi empiris di lapangan.

Hasil penelitian ini mendukung pandangan Chambers (1997) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan instrumen untuk mengurangi kesenjangan informasi antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu, Friedmann (1987) menegaskan bahwa masyarakat harus diberikan ruang untuk mengidentifikasi persoalan pembangunan berdasarkan kebutuhan mereka sendiri sehingga proses perencanaan menjadi lebih demokratis dan kontekstual.

b. Collaborate: Membangun Kolaborasi dalam Penyusunan Program

Setelah isu pembangunan berhasil dipetakan, peserta memasuki tahap *Collaborate*, yaitu proses diskusi kelompok berdasarkan tema tertentu. Pada tahap ini setiap kelompok melakukan analisis akar permasalahan sekaligus menyusun alternatif solusi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sekretaris Sanggar Seni Sampolo menjelaskan bahwa kelompoknya mengembangkan tema teknologi dengan tetap mempertahankan identitas budaya Kota Ternate melalui rekomendasi program Ternate Smart Screen sebagai media city branding.

"torang merekomendasikan Ternate Smart Screen untuk city branding Kota Ternate." (Wawancara, 23 Mei 2025).

Sementara itu, perwakilan Komunitas Dufa-Dufa Bergerak menjelaskan bahwa kelompoknya mengusulkan pembangunan Galeri Kebudayaan sebagai ruang untuk memperkenalkan sejarah dan budaya Kota Ternate kepada masyarakat luas.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa proses kolaborasi berhasil menghasilkan berbagai rekomendasi program yang mengintegrasikan inovasi dengan nilai-nilai budaya lokal. Diskusi yang dilakukan tidak hanya menghasilkan gagasan pembangunan, tetapi juga memperkuat hubungan antarkomunitas melalui pertukaran pengetahuan dan pengalaman.

Temuan ini sejalan dengan pendapat Midgley (2014) yang menyatakan bahwa pembangunan berbasis komunitas mampu memperkuat kohesi sosial melalui keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, tahap Collaborate menjadi fondasi penting dalam membangun perencanaan pembangunan yang inklusif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

c. Co-Create: Menciptakan Solusi Secara Kolektif

Tahap Co-Create merupakan fase ketika peserta mulai mengembangkan solusi konkret melalui pendekatan Design Thinking. Pada tahap ini komunitas tidak hanya menyampaikan ide, tetapi juga menyusun prototipe program menggunakan berbagai perangkat analisis seperti *Empathy Mapping*, *Context Map*, dan *5 Why's Canvas*.

Ketua Komunitas ANKAM menjelaskan bahwa penggunaan berbagai metode tersebut membantu peserta menggali akar permasalahan sehingga solusi yang dihasilkan menjadi lebih tepat sasaran.

Sementara itu, perwakilan Pokdarwis Kastela menjelaskan bahwa setiap kelompok diberikan

kebebasan untuk berpikir kreatif dalam menentukan prioritas masalah sebelum merumuskan solusi yang akan diajukan kepada pemerintah.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa tahap Co-Create merupakan bentuk partisipasi tertinggi karena masyarakat tidak lagi berperan sebagai pemberi aspirasi, tetapi telah menjadi pencipta solusi pembangunan. Kondisi ini memperlihatkan adanya transformasi dari partisipasi konsultatif menuju partisipasi kolaboratif.

Hasil penelitian ini mendukung teori Friedmann (1987) yang menekankan bahwa masyarakat harus memiliki kontrol terhadap proses penyusunan pembangunan sehingga solusi yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat.

d. Commerce: Mendorong Nilai Ekonomi dan Keberlanjutan Program

Tahap Commerce diarahkan untuk memastikan bahwa setiap program yang dihasilkan tidak hanya menyelesaikan persoalan sosial, tetapi juga memiliki nilai ekonomi serta mampu memperkuat identitas Kota Ternate.

Ketua Ternate Creative Space menjelaskan bahwa beberapa rekomendasi komunitas telah direalisasikan pemerintah, seperti Panggung Kreatif Benteng Oranje, Pendopo, serta Aplikasi Pasian.

Temuan tersebut diperkuat oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappelitbangda yang menjelaskan bahwa seluruh ide komunitas dikawal sejak proses diskusi hingga penyusunan prototipe sebelum diintegrasikan ke dalam perencanaan pemerintah.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif mampu menghasilkan inovasi pembangunan yang memberikan manfaat ekonomi sekaligus memperkuat city branding Kota Ternate. Hal ini memperlihatkan bahwa partisipasi masyarakat tidak berhenti pada penyampaian aspirasi, tetapi mampu menghasilkan program yang dapat diimplementasikan pemerintah.

e. Celebrate: Pengakuan terhadap Kontribusi Komunitas

Tahap terakhir adalah *Celebrate*, yaitu presentasi hasil Musrenbang Komunitas di hadapan Wali Kota dan Organisasi Perangkat Daerah. Tahap ini menjadi momentum penentuan program yang dinilai layak untuk diintegrasikan ke dalam RPJMD Kota Ternate.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa presentasi tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi merupakan bentuk pengakuan pemerintah terhadap kontribusi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Musrenbang Komunitas telah mengubah posisi masyarakat dari penerima manfaat menjadi mitra pemerintah dalam penyusunan kebijakan pembangunan. Model ini memperkuat prinsip tata kelola kolaboratif yang menempatkan masyarakat sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan.

Integrasi Program Komunitas ke dalam RPJMD Kota Ternate

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program-program yang dihasilkan dalam Musrenbang Komunitas tidak berhenti pada tahap penyampaian usulan, tetapi dikawal hingga proses integrasi ke dalam RPJMD Kota Ternate. Pengawasan dilakukan melalui koordinasi antara Bappelitbangda, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan komunitas sehingga setiap program disesuaikan dengan kewenangan serta prioritas pembangunan daerah.

Temuan ini menunjukkan bahwa Musrenbang Komunitas telah berhasil menerapkan pendekatan bottom-up planning dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Program yang dihasilkan tidak hanya memperoleh legitimasi sosial dari masyarakat, tetapi juga memperoleh legitimasi administratif melalui integrasi ke dalam RPJMD. Dengan demikian, Musrenbang Komunitas di Kota Ternate dapat

dipandang sebagai model inovatif dalam tata kelola pembangunan partisipatif yang memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, Musrenbang Komunitas di Kota Ternate terbukti menjadi inovasi dalam perencanaan pembangunan partisipatif yang memperluas keterlibatan masyarakat, khususnya anak muda, dalam proses penyusunan pembangunan daerah. Pelaksanaan Musrenbang Komunitas mencerminkan pergeseran dari pendekatan top-down menuju bottom-up planning yang lebih demokratis, kontekstual, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Proses tersebut dilaksanakan melalui lima tahapan partisipatif, yaitu *Connect*, *Collaborate*, *Co-Create*, *Commerce*, dan *Celebrate*, yang mampu menciptakan ruang diskusi, kolaborasi, perumusan solusi, hingga pengakuan terhadap kontribusi komunitas dalam pembangunan daerah.

Keterlibatan komunitas sejak tahap identifikasi isu, penyusunan rekomendasi program, hingga presentasi hasil kepada pemerintah telah menumbuhkan rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap hasil Musrenbang serta memperkuat komitmen kolektif untuk mengawal implementasi program. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa sejumlah usulan komunitas telah diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ternate, yang mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat melalui mekanisme pengawalan bersama Bappelitbangda. Selain memperkaya gagasan pembangunan, partisipasi anak muda menghasilkan berbagai inovasi yang berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat serta memperkuat pemberdayaan sosial dan politik generasi muda. Oleh karena itu, Musrenbang Komunitas di Kota Ternate layak dijadikan best practice dalam pengembangan tata kelola pembangunan yang lebih inklusif, kolaboratif,

demokratis, dan partisipatif bagi daerah lain di Indonesia.

REFERENSI

- Abady, A. P. (2013). Perencanaan partisipatif dalam pembangunan daerah. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(1).
<https://doi.org/10.26618/ojip.v3i1.55>
- Ahmad, J. (2015). *Metode penelitian administrasi publik: Teori dan aplikasi* (Cetakan I). Gava Media.
- Chambers, R. (1997). *Whose reality counts? Putting the first last*. Intermediate Technology Publications.
- Dwiyanto Indiahono. (2017). *Kebijakan publik berbasis dynamic policy analysis* (Cetakan I). Gava Media.
- Fitriyana, F. (n.d.). *Pengembangan Bandung kota kreatif melalui kekuatan kolaboratif komunitas*.
- Friedmann, J. (1987). *Planning in the public domain: From knowledge to action*. Princeton University Press.
- Hasan, S. (2018). Sistem perencanaan pembangunan dalam penataan hukum nasional, 1(3).
- Ismowati, M., Brajanegara, H., Sianturi, M., & Yuliyanto. (2021). An analysis of public participation in e-Musrenbang (Planning Development Discussion) as an effort to support the successful performance of Tanjung Priok District Jakarta. In *Proceedings of the 1st International Conference on Science and Technology in Administration and Management Information (ICSTIAMI 2019)*. EAI.
<https://doi.org/10.4108/eai.17-7-2019.2302183>
- Kartasmita, G. (1996). *Pembangunan untuk rakyat: Memadukan pertumbuhan dan pemerataan*. PT Pustaka Cidesindo.
- Midgley, J. (2014). *Social development: Theory and practice*. Sage Publications.
- Murdiyanto, E. (2020). *Metode penelitian kualitatif*.
- Nur Ritonga, S. H., & Humaizi. (2021). E-effectiveness Musrenbang's in the development planning process in Medan's Denai District. *Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal*, 11(2), 185–196.
<https://doi.org/10.31289/jap.v11i2.5614>
- Openg, E. N. B. (2022). *Partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur*.
- Pontoh, N. K., & Kustiwan, I. (2009). *Pengantar perencanaan perkotaan*. Penerbit ITB.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104.